

ABSTRAK

Nama : Hibatul Azizi Ramadhan
Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian pada Program Studi Ilmu Administrasi
Publik Pendidikan Ilmu Kepegawaian
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Surat Keputusan Bersama Terkait
Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan

Penulisan ini disusun untuk memaparkan status PNS Tipikor terhadap SKB Pemberhentian PNS Tipikor, yang kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penulisan disusun secara deskriptif dan didukung dengan data yang diperoleh melalui observasi, diskusi, penelusuran internet, dan dokumentasi. Sejauh ini, status PNS Tipikor melalui Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian, BKN memberikan penetapan pertimbangan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat. Walaupun begitu, ada saja permasalahan yang terjadi dalam menerapkan SKB Pemberhentian PNS tersebut, diantaranya, adanya beberapa PNS Tipikor yang masih belum diberhentikan. Hasil penelitian menyarankan adanya *warning* dari BKN berupa sanksi yang tegas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengimplementasikan SKB Pemberhentian PNS tersebut.

Kata kunci: *PNS Tipikor, SKB Pemberhentian PNS Tipikor, Status*

ABSTRACT

Name : Hibatul Azizi Ramadhan
Study Program : Bachelor Degree of State Administration of Civil Servant Education
Title : Juridical Overview of the Application of the Joint Decree on Law Enforcement Against Civil Servants Committing Criminal Offenses or Crimes Related to Position.

This writing was prepared to describe the status of the Corruption Court Civil Servants against the SKB Termination of Corruption Civil Servants, which was then linked to Law Number 5 of 2014 concerning ASN, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, PP Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants and BKN Regulation Number 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissing Civil Servants. This research is qualitative research with writing arranged descriptively and supported by data obtained through observation, discussion, internet search, and documentation. So far, the status of Corruption Officers through the Directorate of Status and Position of Staffing, BKN provides the determination of considerations not to be respected. Even so, there are problems that occur in implementing the SKB Dismissing these civil servants, among others, the existence of several Corruption Officers who still have not been dismissed. The results of the study suggested that there was a warning from BKN in the form of strict sanctions to Civil Service Officials in implementing the SKB Dismissing the Civil Servants.

Keywords: *Civil Servant Corruption, SKB Termination of Corruption Civil Servants, Status*

